



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah telah mengajukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Pemerintah Pusat melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendanai penyelesaian program kegiatan pembangunan serta penanggulangan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara, dan pelaksanaannya telah diatur sebagaimana Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 25 Tanggal 25 September 2020;
 - b. bahwa Perjanjian Pinjaman PEN sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, mengalami penyesuaian sesuai Perubahan I Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-170/SMI/1220 tentang Perubahan 1 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 25 Tanggal 25 September 2020, dimana menjelaskan antara lain sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) bahwa masa pencairan pinjaman (availability period) diperpanjang sejak tanggal pencairan pertama pinjaman yaitu tanggal 8 (delapan) Desember 2020 sampai dengan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) Maret 2020, sehingga Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melalui Perangkat Daerah terkait yang mengelola kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN perlu melakukan penyesuaian sesuai dengan masa pencairan sebagaimana perjanjian;

- c. bahwa masih terdapat sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Tahun 2020 yang belum sepenuhnya terealisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.9.585.145.805,00, dan sebagaimana Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-20/PK/2021 tanggal 4 Februari 2021 Hal Pelaksanaan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dari Sisa Dana BOK Tambahan TA. 2020 Untuk Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan, maka Pemerintah Daerah diarahkan mengalokasikan kembali pada APBD TA> 2021 dan segera memanfaatkan sisa dana BOK Tambahan TA. 2020 untuk pembayaran Insentif tenaga Kesehatan yang belum terealisasi pada Tahun 2020 dengan mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2539/2020;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dari Penjaminan PEN dan sisa dana BOK Tambahan Tahun 2020 yang belum dianggarkan pada Perda Provinsi Sulawesi Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2020, maka sesuai ketentuan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 202 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 202 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini beserta Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4.	PENDAPATAN DAERAH	4.072.305,545.344,00	4.072.305,545.344,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bertambah/Berkurang Jumlah.....	1,413.292.261.344,00	1,413.292.261.344,00
4.1.01	Pajak Daerah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	1.123.928.911.799,00	
4.1.02	Retribusi Daerah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	16.850.495.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Bertambah/Berkurang Jumlah.....	50.838.250.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	221.674.604.585,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER Bertambah/Berkurang Jumlah.....	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Bertambah/Berkurang Jumlah.....	2.639.013.284.000,00	
4.3	LAIN_LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	20.000.000.000,00	
5.	BELANJA	4.087.615.938.923,00	4.159.666.627.018,00
5.1	BELANJA OPERASI Bertambah/Berkurang Jumlah.....	3.061.443.855.553,00	3.061.443.855.553,00
5.1.01	Belanja Pegawai Bertambah/Berkurang Jumlah.....	1.366.234.187.402,00 <u>7.000.000.000,00</u> 1.373.234.187.402,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa Bertambah/Berkurang Jumlah.....	887.200.609.693,00 <u>5.007.327.237,00</u> 892.277.936.930,00	
5.1.03	Belanja Bunga Bertambah/Berkurang Jumlah.....	36.106.503.797,00	
5.1.04	Belanja Subsidi Bertambah/Berkurang Jumlah.....	4.400.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	739.448.552.593,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial Bertambah/Berkurang Jumlah.....	28.054.002.122,00	

5.2	BELANJA MODAL	636.136.359.658,00	636.136.359.658,00
	Bertambah/Berkurang	<u>301.017.312.633,74</u>	
	Jumlah.....	935.153.672.311,74	
5.2.01	Belanja Modal Tanah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	39.735.594.774,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bertambah/Berkurang Jumlah.....	131.827.300.593,00 <u>3.698.388.988,00</u> 135.525.689.583,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Bertambah/Berkurang Jumlah.....	240.358.250.389,00 <u>81.929.373.427,74</u> 322.287.623.816,74	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Bertambah/Berkurang Jumlah.....	220.881.953.901,00 <u>215.389.550.238,00</u> 436.271.504.139,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bertambah/Berkurang Jumlah.....	1.333.260.001,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.313.711,00	7.000.313.711,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga Bertambah/Berkurang Jumlah.....	7.000.313.711,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	457.086.098.096,00	457.086.098.096,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Bertambah/Berkurang Jumlah.....	367.086.098.096,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan Bertambah/Berkurang Jumlah.....	90.000.000.000,00	
Total Surplus/(Defisit)		-87.361.081.674,00	-400.455.721.564,74
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	167.521.081.674,00	480.615.721.564,74
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Bertambah/Berkurang Jumlah.....	80.000.000.000,00 <u>92.304.561.516,64</u> 172.304.561.516,64	
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	87.521.81.674,00 <u>220.790.078.374,10</u> 308.311.160.48,10	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	80.160.000.000,00	80.160.000.000,00
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah Bertambah/Berkurang Jumlah.....	160.000.000,00	
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo Bertambah/Berkurang Jumlah.....	80.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	87.361.081.647,00	400.455.721.564,74
	Bertambah/Berkurang Jumlah.....	<u>313.094.639.890,74</u> 40.455.721.564,74	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 22 Februari 2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 22 Februari 2021

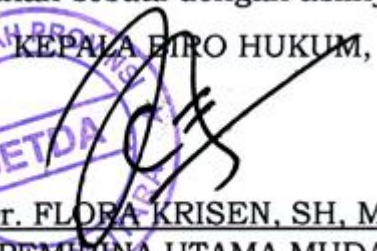
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

ttd

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6
4	PENDAPATAN DAERAH	4.072.305,545.344,00	4.072.305,545.344,00	0,00	0,00%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,413.292.261.344,00	1,413.292.261.344,00	0,00	0,00%
4.1.1	Pajak Daerah	1.123.928.911.799,00	1.123.928.911.799,00	0,00	0,00%
4.1.2	Retribusi Daerah	16.850.495.000,00	16.850.495.000,00	0,00	0,00%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	50.838.250.000,00	50.838.250.000,00	0,00	0,00%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	221.674.604.585,00	221.674.604.585,00	0,00	0,00%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00	0,00	0,00%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00	0,00	0,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00%
4.3.1	Pendapatan Hibah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00%
5	BELANJA DAERAH	4.159.666.627.018,00	4.472.761.266.908,00	313.094.639.890,00	7,53%
5.1	BELANJA OPERASI	3.061.443.855.553,00	3.073.521.182.790,00	12.077.327.237,00	0,39%
5.1.1	Belanja Pegawai	1.366.234.187.402,00	1.373.234.187.402,00	7.000.000.000,00	0,51%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	887.200.609.693,00	892.277.936.930,00	5.077.327.237,00	0,57%
5.1.3	Belanja Bunga	36.106.503.797,00	36.106.503.797,00	0,00	0,00%
5.1.4	Belanja Subsidi	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00	0,00%
5.1.5	Belanja Hibah	739.448.552.593,00	739.448.552.593,00	0,00	0,00%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28.054.002.122,00	28.054.002.122,00	0,00	0,00%
5.2	BELANJA MODAL	634.136.359.658,00	935.153.672.311,74	301.017.312.653,74	47,47%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	39.735.594.774,00	39.735.594.774,00	0,00	0,00%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.827.300.593,00	135.525.689.851,00	3.698.388.988,00	2,81%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bantuan	240.358.250.389,00	322.287.623.816,74	81.929.373.427,74	43,09%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.881.953.901,00	436.271.504.139,00	215.389.550.238,00	97,51%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.333.260.001,00	1.333.260.001,00	0,00	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.313.711,00	7.000.313.711,00	0,00	0,00%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.000.313.711,00	7.000.313.711,00	0,00	0,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	457.086.098.096,00	457.086.098.096,00	0,00	0,00%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	367.086.098.096,00	367.086.098.096,00	0,00	0,00%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	0,00%
	Surplus/(Defisit)	(87.361.081.674,00)	(400.455.721.564,74)	(313.094.639.890,74)	358,39%

6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	167.521.081.674,00	480.615.721.564,00	313.094.639.890,74	186,90%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.000.000.000,00	172.304.561.516,64	92.304.561.516,64	115,38%
6.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	87.521.081.674,00	308.311.160.048,10	220.790.078.374,10	252,27%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	80.160.000.000,00	80.160.000.000,00	0,00	0,00%
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00%
6.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	0,00%
	Pembiayaan Netto	87.361.081.674,00	400.455.721.564,74	72.050,6888.095,00	470,60%
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00%

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

OLLY DONDOKAMBEY

Lampiran I Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021

Nomor : 8 Tahun 2021

Tanggal : 22 Februari 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE REKENING	URAIAN	APBD T.A 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
TOTAL SUMBER PEMBIAYAAN PEN					303.509.494.85,74		
1	DINAS KESEHATAN	1.02. 1-02.0-00.0-01.00.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01. 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01. 1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.311.719.762,00	3.895.938.988,00	9.207.658.750,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01. 1.07.10.5.2	BELANJA MODAL	5.311.719.762,00	3.895.938.988,00	9.207.658.750,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01. 1.07.10.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.981.719.762,00	3.698.388.988,00	8.680.108.750,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01 1.07.10.5.2.2.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.426.634.666,00	2.813.994.488,00	7.240.629.154,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01 1.07.10.5.2.2.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.426.634.666,00	2.813.994.488,00	7.240.629.154,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01 1.07.10.5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium		884.394.500,00	884.394.500,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01 1.07.10.5.2.2.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium		884.394.500,00	884.394.500,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01 1.07.10.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		197.550.000,00	197.550.000,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01 1.07.10.5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi		197.550.000,00	197.550.000,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01 1.07.10.5.2.4.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor		197.550.000,00	197.550.000,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00 01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01. 1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.102.978.389,00	2.272.407.558,00	4.375.385.947,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01 1.09.009.5.2	BELANJA MODAL	1.753.360.207,00	2.272.407.558,00	4.025.767.765,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01 1.09.09.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.753.360.207,00	2.272.407.558,00	4.025.767.765,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01 1.09.09.5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.753.360.207,00	2.272.407.558,00	4.025.767.765,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.01 1.09.09.5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.753.360.207,00	2.272.407.558,00	4.025.767.765,00	

		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.873.723,443,00	2.492.181,432,00	9.365.904.875,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02.1.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	6.873.723,443,00	2.492.181,432,00	9.365.904.875,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02.1.02.11.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.873.723,443,00	2.492.181,432,00	9.365.904.875,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02.1.02.11.5.1.2.01	Belanja Barang	5.059.876.700,00	2.492.181,432,00	7.552.058.132,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02.1.02.11.5.1.2.01.01	Belanja Pakai Habis	5.059.876.700,00	2.492.181,432,00	7.552.058.132,00	
JUMLAH PEN DINKES					8.660.527.978,00		
2	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03.3-00.0-00.0-01.00.01.1.01.06.5	BELANJA DAERAH				
		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA (SDA)				
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.02.1.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.026.730.000,00	3.221.080.357,30	4.247.810.357,30	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.02.1.01.10	BELANJA MODAL	1.026.730.000,00	3.221.080.357,30	4.247.810.357,30	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.02.1.01.10.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.026.730.000,00	3.221.080.357,30	4.247.810.357,30	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.02.1.01.10.5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.026.730.000,00	3.221.080.357,30	4.247.810.357,30	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.02.1.01.10.5.2.4.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.026.730.000,00	3.221.080.357,30	4.247.810.357,30	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000Ha-3000Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				

		1.03.3-00.0-00.0-01.00.02 1.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.700.013.191,00	199.074.000,00	2.899.87.191,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.02 1.02.02.5.2	BELANJA MODAL	2.700.013.191,00	199.074.000,00	2.899.87.191,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.02 1.02.02.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.700.013.191,00	199.074.000,00	2.899.87.191,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.02 1.02.02.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.700.013.191,00	199.074.000,00	2.899.87.191,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.02 1.02.02.5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	2.700.013.191,00	199.074.000,00	2.899.87.191,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.03. 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.03. 1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	3.049.970.000,00	2.734.795.660,00	5.784.765.660,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.03. 1.01.03.5.2	BELANJA MODAL		2.734.795.660,00	2.734.795.660,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.03. 1.01.03.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		2.734.795.660,00	2.734.795.660,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.03. 1.01.03.5.2.4.04	Belanja Modal Jaringan		2.734.795.660,00	2.734.795.660,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.03. 1.01.03.5.2.4.04	Belanja Modal Jaringan Air Minum		2.734.795.660,00	2.734.795.660,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.09. 1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Dearah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.09. 1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	42.975.451.997,00	49.278.800.550,00	92.254.252.547,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.09. 1.01.03.5.2	BELANJA MODAL	3.025.452.000,00	49.278.800.550,00	52.304.252.550,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.09. 1.01.03.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.025.452.000,00	49.278.800.550,00	52.304.252.550,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.09. 1.01.03.5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.025.452.000,00	49.278.800.550,00	52.304.252.550,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.09. 1.01.03.5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.025.452.000,00	49.278.800.550,00	52.304.252.550,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10. 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi				

		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	38.677.247.984,00	26.853.619.287,84	65.530.867.271,84	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.05.5.2	BELANJA MODAL	37.377.248.008,00	26.853.619.287,84	64.230.867.295,84	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.05.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.377.248.008,00	26.853.619.287,84	64.230.867.295,84	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.05.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	29.878.852.059,00	20.163.545.418,00	50.042.397.477,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.05.5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	29.878.852.059,00	20.163.545.418,00	50.042.397.477,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.05.5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.498.395.949,00	6.690.073.869,84	14.188.469.818,84	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.05.5.2.4.02.04	Belanja Modal Bagunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.800.000.000,00	1.161.549.288,84	2.961.549.288,84	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.05.5.2.4.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.698.395.949,00	5.528.524.581,00	11.226.920.530,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	131.959.171.292,00	135.359.059.599,71	267.318.230.891,71	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.08.5.2	BELANJA MODAL	111.959.171.292,00	135.359.059.599,71	247.318.230.891,71	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.08.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.959.171.292,00	135.359.059.599,71	247.318.230.891,71	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.08.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	111.959.171.292,00	135.359.059.599,71	247.318.230.891,71	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.08.5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	111.959.171.292,00	135.359.059.599,71	247.318.230.891,71	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	7.494.890.108,00	1,00	7.494.890.109,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.09.5.2	BELANJA MODAL	7.494.890.108,00	1,00	7.494.890.109,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.09.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.494.890.108,00	1,00	7.494.890.109,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.09.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	7.494.890.108,00	1,00	7.494.890.109,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.09.5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	7.494.890.108,00	1,00	7.494.890.109,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan	8.637.482.633,00	36.251.011.262,00	44.888.493.895,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.12.5.2	BELANJA MODAL	8.637.482.633,00	36.251.011.262,00	44.888.493.895,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.1.01.12.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.637.482.633,00	36.251.011.262,00	44.888.493.895,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.637.482.633,00	36.251.011.262,00	44.888.493.895,00	

		1.01.12.5.2.4.01					
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10. 1.01.12.5.2.4.01.02	Belanja Modal Jembatan		36.251.011.262,00	36.251.011.262,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10. 1.01.18	Rehabilitasi Jembatan		1.517.746.985,00	1.517.746.985,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10. 1.01.18.5.2	BELANJA MODAL		1.517.746.985,00	1.517.746.985,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10. 1.01.18.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi		1.517.746.985,00	1.517.746.985,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10. 1.01.18.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		1.517.746.985,00	1.517.746.985,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.10. 1.01.18.5.2.4.01.02	Belanja Modal Jembatan		1.517.746.985,00	1.517.746.985,00	
JUMLAH PEN DINAS PU					258.355.925.898,00		
3	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH	1.03.3-00.0-00.0-01.00.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	948.312.593,00	34.667.487.588,74	35.615.800.181,74	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03.5.2	BELANJA MODAL		34.667.487.588,74	34.667.487.588,74	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		28.552.612.698,74	28.552.612.698,74	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03.5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		28.552.612.698,74	28.552.612.698,74	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03.5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		28.552.612.698,74	28.552.612.698,74	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		6.114.874.890,00	6.114.874.890,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		2.991.275.061,00	2.991.275.061,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03.5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan		2.891.275.061,00	2.891.275.061,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03.5.2.4.01.02	Belanja Modal Jembatan		100.000.000,00	100.000.000,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03.5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air		3.117.879.223,00	3.117.879.223,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03.5.2.4.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi		100.000.000,00	100.000.000,00	

		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03.5.2.4.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam		1.201.828.013,00	1.201.828.013,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03.5.2.4.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor		1.816.051.210,00	1.816.051.210,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03.5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi		5.720.606,00	5.720.606,00	
		1.03.3-00.0-00.0-01.00.05. 1.01.03.5.2.4.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku		5.720.606,00	5.720.606,00	
JUMLAH PEN DINAS PERKIM					34.667.487.588,74		
4	DINAS PERHUBUNGAN	2.15.2-15.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
		2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				
		2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal		1.825.552.621,00	1.825.552.621,00	
		2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.1.03.02.5.2	BELANJA MODAL		1.825.552.621,00	1.825.552.621,00	
		2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.1.03.02.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.825.552.621,00	1.825.552.621,00	
		2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.1.03.02.5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		1.825.552.621,00	1.825.552.621,00	
		2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.1.03.02.5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		1.825.552.621,00	1.825.552.621,00	
JUMLAH PEN DINAS PERHUBUNGAN					1.825.552.621,00		
TOTAL SUMBER PEMBIAYAAN DARI SISA DANA BOK TAMBAHAN TAHUN 2020							
1	DINAS KESEHATAN	1.02.1-02.0-00.0-01.00.02.1.01.21.5.1.2.01	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02.1.01.21.5.1.2.01.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.000.000,00	9.585.145.805	9.585.145.805	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02.1.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	9.585.145.805	9.585.145.805	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02.1.02.17.5.1.1	Belanja Pegawai		7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02.1.02.17.5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	

		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02. 1.02.17.5.1.1.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02. 1.02.17.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	2.585.145.905,00	2.585.145.905,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02. 1.02.17.5.1.2.02	Belanja Jasa		2.585.145.905,00	2.585.145.905,00	
		1.02.1-02.0-00.0-01.00.02. 1.02.17.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor		2.585.145.905,00	2.585.145.905,00	

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

OLLY DONDOKAMBEY